

Nomor : 13787/D.2/10/2020 26 Oktober 2020  
Hal : Pengumuman Penjelasan Konteks Integrasi SIRUP dalam Rencana Aksi MCP  
Korsupgah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

Menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya terkait salah satu rencana aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK dalam mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran APBD dengan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), dalam hal ini sistem perencanaan PBJP melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP melalui surat dengan Nomor : 10164/D.2.1/09/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Permohonan Penjelasan Rencana Aksi terkait SIRUP yang ditujukan kepada Pimpinan Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK, yang kemudian ditindaklanjuti pula dalam rapat daring bersama pada tanggal 28 September 2020, berikut beberapa hal yang dapat kami sampaikan :

1. Dalam perspektif SIRUP, pengintegrasian perencanaan dan penganggaran APBD (Pemda) dengan SIRUP dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
  - a. Sudah terfasilitasinya penayangan/pengunggahan file anggaran Pemda keluaran SIMDA/SIMRAL/SIPKD maupun aplikasi lainnya ke dalam aplikasi SIRUP melalui fitur "upload RKA"; atau
  - b. Penarikan RUP dari aplikasi lokal Pemda ke dalam aplikasi SIRUP melalui mekanisme web service.
2. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP selaku penanggung jawab dan pengelola aplikasi SIRUP dengan Tim Korsupgah KPK, Pemda dinyatakan sudah melakukan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran APBD dengan SIRUP jika sudah melakukan salah satu cara pengintegrasian sesuai poin 1 di atas;
3. Data rekapitulasi Pemda yang sudah melakukan pengintegrasian dapat diakses secara terbuka melalui laman berikut : <http://tiny.cc/StatusUploadPemdaSIRUP>
4. Data pada laman tersebut pada poin 3, sudah kami sampaikan pula secara resmi kepada Tim Korsupgah KPK.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi,  
dan Pengembangan Sistem  
Informasi,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*  
Salusra Widya

Tembusan :  
1. Kepala LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : wfvWTW  
Nomor Tiket : SK202010260012

2. Deputi Pencegahan KPK
3. Pimpinan Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : wfvWTW  
**Nomor Tiket** : SK202010260012